YOGYAKARTA

PASAR MURAH KEMANTREN BERAKHIR

Tak Pernah Sepi Pembeli, Warga Minta Dirutinkan

YOGYA (**KR**) - Pasar murah kemantren tahap pertama yang difasilitasi Dinas Perdagangan Kota Yogya mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Setiap kali digelar secara bergiliran di tiap kemantren, tidak pernah sepi pembeli. Warga bahkan meminta agar pasar murah kemantren menjadi agenda rutin.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogya Sri Riswanti, membenarkan hal tersebut. "Iya hari ini (kemarin) yang terakhir. Kami gelar di Kemantren Pakualaman. Hari ini juga bersamaan dengan pasar murah di Kampung Bumen Purbayan Kotagede diselenggarakan yang Disperindag DIY," ungkapnya, Senin (18/3).

Pasar murah yang digelar di tiap kemantren dimulai sejak 26 Februari 2024 lalu dengan lokasi pertama di Kemantren Jetis. Setiap hari pada hari kerja lokasinya berpindah dari kemantren satu ke kemantren lain. Dalam gelaran pasar murah kemantren, sejumlah komoditas yang dijual ke masyarakat antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu dan tepung beras.

Pemkot Yogya bekerja sama dengan Bulog dan toko retail untuk menggulirkan kegiatan terse-

but. Khusus untuk beras total disediakan 68 ton yang didistribusikan ke 14 kemantren di Kota Yogya. Masing-masing dicukupi oleh Bulog sebanyak 34 ton dan toko retail yakni Manna Kampus, Maga Swalayan dan

Lestari sebanyak 34 ton.

Diakuinya, dari sejumlah komoditas tersebut beras merupakan yang paling diburu oleh masyarakat. Hal itu wajar karena harga beras di pasaran masih terpantau tinggi. Sedangkan harga yang dipatok dalam pasar murah dapat ditekan karena ada subsidi yang diberikan oleh Pemkot Yogya. Untuk beras sudah dikemas ukuran lima kilogram per kantong. Harga beras SPHP jenis medium perkantong mencapai Rp 51.000 dan beras jenis premium perkantong ukuran lima kilogram dihargai Rp 69.500. Masyarakat boleh menebus maksimal dua kantong untuk beras SPHP jenis medium, dan satu kantong jenis premium. "Sasaran yang bisa

kemantren setempat dengan menunjukkan KTP," imbuh Riswanto.

Menurutnya, dari beberapa warga yang ia temui selama pasar murah kemantren digelar, sangat mengharapkan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin. Hal ini karena di samping momentum yang cukup tepat, kegiatan pasar murah selama ini sangat ditunggutunggu oleh masyarakat.

"Kami sudah mengagendakan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Tahap pertama sudah diawali kali ini, kemudian nanti akan dilanjutkan pada Juni, September dan November," tandasnya.

Kegiatan pasar murah sekaligus bagian dari intervensi atau stabilitasi harga baik yang ada di pasar maupun di wilayah. Keterlibatan toko ritel dalam pasar murah juga mampu memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Pasalnya, toko retail tersebut dipersilakan menjual komoditas tambahan seperti kecap dan lainnya namun dengan harga promo dari toko. Dengan begitu masyarakat atau pembeli bisa mendapatkan pilihan yang beragam.

Sedangkan dalam menghadapi Lebaran pihaknya akan

pemantauan-pemantauan tel. Baik di pasar rakyat tuk memastikan pasokan ga stabil.

membeli ialah warga di mengedepankan agenda di distributor dan toko ri- maupun pasar modern un- tetap aman dan harga ju-



PROGRAM TEPAT SASARAN, WARGA DIMUDAHKAN AKSES LAYANAN

Segera Realisasikan Sistem Satu Data Terintegrasi

YOGYA (KR) - Sistem satu data terintegrasi yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) diharapkan dapat segera direalisasikan. Melalui perangkat tersebut maka masyarakat selaku pengakses layanan akan dimudahkan serta program pembangunan yang digulirkan pemerintah pun bisa semakin tepat sasaran.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya dari Fraksi Partai Golkar Nur Anita Owiwanti Putri MG, SP menjelaskan satu data terintegrasi sudah menjadi keniscayaan pada perkembangan digital. "Sekarang mau akses kesehatan, pendidikan, perizinan dan lain-lain membutuhkan banyak persyaratan. Kartu yang digunakan juga bermacam-macam. Seharusnya bisa cukup dengan satu kartu saja jika sistem satu data sudah terintegrasi," tandasnya.

Ita, sapaan akrabnya mencontohkan ketika warga hendak melakukan pemeriksaan kesehatan harus menyiapkan berbagai kartu. Misalnya dari puskesmas berpindah ke fasilitas kesehatan lain pun seringkali harus dilakukan pemeriksaan administrasi lagi dari awal. Setiap rumah sakit juga menerbitkan kartu peserta sendirisendiri. Begitu pula untuk mengakses jaminan pendidikan minimal harus

Nur Anita Owiwanti Putri MG SP Fraksi Partai Golkar



menyiapkan kartu miskin, Kartu Indonesia Pintar maupun Kartu Pelajar.

Oleh karena itu jika satu data sudah terintegrasi, maka semua instansi atau OPD bisa mengaksesnya secara terpadu. Dengan mendasarkan pada NIK maka database masyarakat sudah bisa diakses. OPD teknis juga dapat menggunakan sesuai kebutuhan pelayanan. "Ini juga bisa digunakan untuk sasaran program pemerintah. Misalnya kegiatan pelatihan, peser-

tanya jangan hanya itu-itu saja. Kalau sudah pernah mengikuti, maka dalam data sudah tercantum sehingga tidak bisa dobel. Sistemnya otomatis akan menutup akses agar bisa diganti yang lain sesuai sasaran," jelasnya.

Selain itu, SDM di tiap OPD juga harus bisa menyesuaikan. Setiap progres layanan harus langsung diupdate dalam sistem. Dengan begitu bagi warga yang tengah mengajukan layanan publik terutama perizinan maka pentahapannya bisa diketahui. Apalagi Kota Yogya juga telah memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga akan lebih mudah dalam merealisasikan satu data terintegrasi.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya, imbuh Ita, sebenarnya sudah menggagas sistem atau aplikasi tersebut. Hanya masih terkendala dengan teknis kebijakan di tiap OPD. "Seharusnya ego sektoral tiap OPD dikesampingkan dulu. Parameter layanan kan sudah cukup jelas. Jangan sampai kemudian muncul kebijakan sendiri-sendiri. Satu data ini kan untuk kepentingan semua pihak. Seharusnya bisa segera direalisasikan sembari jika muncul persoalan teknis bisa dijadikan evaluasi," urainya. (Dhi)-f

APRIL, TPA REGIONAL PIYUNGAN DITUTUP

Kabupaten/Kota Dituntut Bergerak Cepat

YOGYA (KR) - Persoalan sampah di DIY sampah saat ini belum bisa ditangani secara tuntas. Oleh karena itu menjediberlakukannya program desentralisasi secara penuh, Pemda DIY terus melakukan koordinasi dengan Pemkot Yogyakarta berkaitan dengan masalah sampah. Karena TPA Regional Piyungan rencananya akan resmi ditutup pada 15 April. Kondisi itu mengharuskan kabupaten/kota bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah sampah.

"Sampai saat ini Pemkot terus berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah dengan memperpanjang waktu operasional Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R). Salah satunya yang berlokasi di Nitikan maupun Karangmiri. Hal itu dilakukan berkaitan adanya penundaan penggunaan lahan pinjam pakai di TPA Regional Piyungan yang rencananya akan digunakan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar atau refused derived fuel (RDF)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo di Yogyakarta, Senin

(18/3).Dikatakan, awalnya Pemkot berencana untuk pinjam pakai sebagian lahan sekitar 2.600 meter persegi untuk pengolahan sampah menjadi RDF di TPA Regional Piyungan. Namun karena ada penolakan warga dan perizinan lokal belum selesai. Pemkot akhirnya mencoba mencari alternatif lain yaitu dengan meningkatkan kapasitas TPS 3R di beberapa tempat untuk meng-handle penundaan di TPA Piyungan. Tindakan itu dilakukan dengan harapan bisa memperpanjang waktu operasional.

"Kebijakan desentralisasi sampah atau pengelolaan sampah secara mandiri tiap kabupaten/ kota masih berjalan sesuai rencana yakni pada pertengahan April 2024 mendatang.Secara hitungan matematis, TPA Piyungan diperkirakan akan penuh per 15 April 2024 mendatang, apabila perharinya masih menampung 350 ton sampah dari Kota Yogya, Sleman dan Bantul," terang

Kusno, seraya menambahkan, jumlah tersebut diprediksikan bisa meningkat dengan adanya momentum libur Idul Fitri.

Terkait menumpuknya sampah di sejumlah depo di Kota Yogya, Kusno menyatakan sudah ada permintaan angkutan khusus dari Pemkot Yogya. "Memang ada permintaan pengangkutan khusus, tapi semua itu tetap sesuai dengan hitungan dan akan terus dievaluasi kami," ujarnya.

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HARTA PAILIT

Kami Tim Kurator H.Fuad (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 20/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Smg jo. Nomor 24/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN.Smg, tanggal 25 November 2019, dalam perkara kepailitan H.Fuad (Dalam Pailit), dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan lelang Melalui Internet dengan Penawaran Tertutup (Closed Bidding) atas harta pailit dalam keadaan apa

Sebidang tanah seluas 668 m2 berikut bangunan permanen (Ruko / Rumah Toko) yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 01/Karangasem, Terdaftar atas nama H.Fuad, berlokasi di Jalan Pantai Selatan, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dijual dalam 1 (satu) paket, yang diletakkan hak tanggungan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gajah Mungkur , Wonogiri, Jawa Tengah

Harga Limit : Rp. 520.750.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh

Uang Jaminan : Rp. 104.150.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang pada: Selasa 02 April 2024

Tanggal Batas Akhir Penawaran: 10.30 (Sesuai Waktu Server) Alamat Domain

portal.lelang.go.id dan /atau lelang.go.id Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta

Penetapan Pemenang

Syarat-syarat Lelang:

- 1. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran tertutup (closed bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Elektronik (ALE) pada domain **portal.lelang.go.id** dan /atau lelang.go.id "Prosedur Lelang" dan "Syarat Lelang" dan "Ketentuan" pada domain tersebut;
- 2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan /atau lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor tersebut):
- 3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA), masing-masing peserta lelang;
- Pemenang Lelang harus melunasi pokok lelang ditambah Bea Lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Objek lelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya (as is), namun tidak terbatas

biaya tertunggak atas objek lelang, dan bukti kepemilikan hak atas tanah dikuasai oleh

Harga penawaran belum termasuk Bea Lelang dan biaya-biaya resmi lainnya;

Kurator. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli; 8. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan lelang, maka pihak-pihak yang erkepentingan/Peserta Lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik Pidana maupun Perdata kepada Kurator dan KPKNL Yogyakarta

9. Bagi Peminat dapat melihat langsung objek lelang pada alamat tersebut diatas, dan formasi lebih lanjut dapat menghubungi Nomor: 0816687669 (Sdr. Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum.), atau menghubungi KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 544091; Magelang, 19 Maret 2024 Tim Kurator H Fuad (Dalam Pailit

Muhammad Saefudin, SH., M. Hum.

Ronald Antony Sirait, S.H.

BRI KEMBALI TERBITKAN GREEN BOND Wujud Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan



BRI kembali menerbitkan Green Bond melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menerbitkan Green Bond melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Penerbitan dilakukan dalam 3 seri yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25% dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

Aksi korporasi ini merupakan salah satu upaya BRI dalam merealisasikan green economy dan juga bagian dari strategi

pendanaan yang menganut Sustainable Principle setelah sebelumnya BRI sukses menerbikan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Terkait dengan hal tersebut, SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengatakan, Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja

"Green Bond merupakan upaya BRI

KR - Istimewa



SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi

dalam mendukung sustainability ataupun keberlanjutan kehidupan manusia serta mendorong tingkat kemakmuran ataupun prosperity. Masyarakat dapat turut serta bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri,,"

ujarnya. la meyakini, aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia yang didorong implementasi ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A). Untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating tersebut menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang,

Adapun jadwal penerbitan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebagai berikut, Tanggal Efektif : 12 Juli 2022 Rencana Masa Penawaran Umum: 7 - 8 Maret 2024; Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024; Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024; Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024: Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024. (*)